

Perkembangan Domestik Indonesia dan Peranan di Kawasan

Jusuf Wanandi

Pengantar

TULISAN ini akan membahas masalah perkembangan dalam negeri Indonesia yang dimulai dari periode ke-5 masa jabatan Presiden Soeharto, yaitu semenjak terpilihnya kembali pada Maret 1988, hingga kini dan beberapa perkiraan mengenai pemilu badan-badan legislatif tahun 1992 serta pemilihan Presiden tahun 1993. Selain itu, akan diuraikan pula beberapa perkembangan yang lebih mendasar tentang sistem politik dan kemasyarakatan yang telah terjadi di dalam tubuh politik bangsa dan negara Indonesia, dan ke mana arah perkembangan itu akan terjadi menurut penulis.

Selanjutnya, juga akan diuraikan beberapa hal, antara lain tinjauan mengenai kemungkinan adanya berbagai kemajuan dalam penerapan strategi *export-led growth* dan deregulasi, yang menjadikan ekonomi Indonesia *self-propelling* di masa mendatang. Dalam uraian ini akan disimpulkan

pula bahwa karena strategi tersebut dan ditambah pula karena perkembangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, ekonomi Indonesia telah menjadi bagian yang penting dari ekonomi regional.

Bagian berikutnya, yaitu yang menyangkut peranan Indonesia di kawasan, akan menjelaskan perkembangan ASEAN dan Asia Tenggara, peranan RI di dalam perkembangan tersebut, serta perkembangan kawasan Asia Pasifik dan peran RI di dalamnya baik bersama-sama ASEAN ataupun sendirian.

Perkembangan Politik RI Sejak Tahun 1988

Karena perdebatan-perdebatan selama Sidang Umum MPR tahun 1988 dilakukan secara lebih terbuka, maka suasana keterbukaan tersebut dilanjutkan dan dimanfaatkan, antara lain oleh para cendekiawan dan media massa sampai pertengahan tahun 1989.

Pada pertengahan tahun 1989, yaitu pada bulan Mei 1989 telah terjadi perdebatan tentang kepresidenan dan siapa yang akan menggantikan Presiden Soeharto. Dalam perdebatan tersebut terdapat spekulasi di antara sekelompok pemikir, bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri pada pertengahan masa jabatannya, meskipun secara jelas dinyatakan pada pidato pelantikannya bahwa dia akan menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.

Karena dalam perdebatan-perdebatan tersebut ada yang sudah menjurus pada masalah-masalah pribadi, maka Presiden Soeharto pada akhir perjalanannya kembali dari US dan Beograd (KTT Non-Blok) telah memperingatkan masyarakat agar perdebatan tersebut jangan sampai merongrong wibawanya, apalagi melakukan usaha-usaha tidak sah untuk menggantikannya. Dengan demikian, fase yang agak bebas dalam perkembangan politik dalam negeri Indonesia telah terhenti untuk sementara.

Pada waktu itu pula telah diselenggarakan Kongres Golongan Karya di Jakarta, di mana ABRI mulai berpartisipasi secara lebih aktif dalam menentukan arahnya melalui para veteran yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat dimengerti karena ABRI merasa bahwa Golkar telah berkembang secara pesat dan perlu mempertahankan cita-cita dan komitmennya pada Pancasila dan UUD 1945. Begitu pula dirasakan bahwa pada Sidang Umum MPR tahun 1988 Golkar telah berjalan sendiri dan kurang mengikutsertakan ABRI. Perasaan ini dapat dimengerti mengingat bahwa Golkar yang dimaksudkan merupakan partai/organisasi kader yang telah menjadi partai massal, sehingga di dalamnya terdapat berbagai macam kelompok yang berasal dari segala lapisan dan sektor masyarakat, sehingga dianggap memerlukan

suatu kelompok inti yang betul-betul *committed* pada Pancasila dan UUD 1945.

Pada Kongres PPP yang diselenggarakan tahun 1989 telah terjadi pergantian pimpinan pusat, yang dianggap kurang kontroversial di antara kelompok-kelompok di dalamnya, sehingga dapat menyatukan kembali unsur-unsur Parmusi. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa 3,5 juta suara dari NU di Jawa Timur saja yang pada Pemilu tahun 1987 telah diberikan terutama pada Golkar (dan sebagian kecil pada PDI), kemungkinan akan diberikan kembali pada PPP, dan hal ini akan mengurangi suara Golkar. Di lain-lain provinsi, hal yang sama dapat terjadi tetapi dengan jumlah suara yang tidak sebanyak di Jawa Timur.

Perdebatan dimulai lagi setelah ada kejadian-kejadian di Eropa Timur, yang semenjak November 1989 telah berkembang cepat, dengan runtuhnya Tembok Berlin, dan dalam waktu kurang dari setahun lamanya negara-negara di sana melepaskan diri dari penguasaan Komunisme dan US. Masalah yang diperdebatkan ialah apa pengaruh perkembangan-perkembangan Eropa Timur dalam perkembangan politik di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Namun perdebatan tersebut tidak terlalu ramai ataupun mendalam, karena disadari bahwa keadaan totaliter yang dialami negara-negara Eropa Timur tidak pernah dialami Indonesia, sehingga kebebasan dan perdebatan secara relatif memang ada dan sistem politik di Indonesia pun memiliki fleksibilitas, meskipun terdapat fase kemunduran-kemunduran di samping adanya kemajuan-kemajuan.

Selain itu, ekonomi Indonesia jauh lebih baik daripada sistem ekonomi yang diatur secara sentral oleh negara-negara Komunis

di Eropa Timur dan US. Apalagi strategi baru di bidang ekonomi telah mengubah struktur ekonomi Indonesia yang mengupayakan *export-led growth* dan deregulasi, sehingga pertumbuhan telah menaik secara substansial dalam tahun 1989 dan 1990, yaitu sekitar 7% setahun. Dengan demikian, kritik-kritik yang dilontarkan terhadap pemerintah di bidang ekonomi pada masa resesi 1985-1986 telah mereda pula.

Pada tahun 1990 dan 1991 telah terjadi berbagai perkembangan yang mendapat perhatian para pengamat politik. Pertama ialah didirikannya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia) oleh para cendekiawan Muslimin. Bukan soal hak didirikannya suatu organisasi cendekiawan yang dipersoalkan, karena hak itu dijamin UUD 1945, melainkan pemerintah telah mencampurinya dan mendukungnya secara besar-besaran. Maka timbul pertanyaan apa maksud dukungan tersebut, yang kemudian dihubungkan pula dengan pemilihan kepresidenan pada tahun 1993. Ada pula di antara para cendekiawan Muslimin yang menyayangkan tentang masih dirasakan perlunya organisasi tersendiri bagi para cendekiawan Muslimin, padahal dalam skala nasional keberadaan mereka sudah efektif. Tantangan bagi cendekiawan Muslimin justru bagaimana masuk ke dalam organisasi-organisasi dan *mainstream* nasional.

Kedua, ialah ajakan Presiden Soeharto terhadap para konglomerat, yang kebanyakan adalah warga negara Indonesia keturunan Cina, agar menjual sahamnya kepada koperasi, yang dianggap sebagai perwujudan perusahaan kecil dan beranggotakan lapisan masyarakat bawah. Maksud kebijaksanaan tersebut ialah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang makin melebar sebagai akibat kebijaksanaan dan strategi pembangunan

ekonomi baru, yaitu deregulasi, privatisasi dan *export-led growth*, yang lebih menganakdakan sektor swasta. Sementara itu, di kalangan sektor swasta yang paling berpengalaman dan sudah mempunyai organisasi kebanyakan adalah dari keturunan Cina, maka merekalah yang antara lain lebih mencolok berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah dengan kenyataan bahwa *going public* membuat perusahaan-perusahaan dan kemampuannya lebih transparan, yang sebenarnya baik tetapi juga menimbulkan reaksi negatif. Satu hal yang memang kurang diperhatikan oleh para teknokrat di Pemerintahan ialah perlunya mengatur akibat-akibat deregulasi, terutama kesenjangan yang ditimbulkannya, dengan berbagai pengaturan tentang *fairness* dalam berkompetisi sampai pada *social policies* yang diperlukan untuk mengatur akibat-akibat deregulasi tersebut.

Kemudian perdebatan ini berlanjut karena terjadinya kontraksi ekonomi, yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar pada awal 1990 di mana ekonomi menjadi *overheated* sehingga menimbulkan bahaya inflasi. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah dua kali mengurangi jumlah uang beredar secara drastis. Karena itu timbul kritik dari pengusaha-pengusaha "pribumi" tentang berkurangnya kesempatan mereka dan adanya keinginan di antara mereka untuk meminta diberlakukannya model Malaysia, yaitu adanya kuota untuk pengusaha-pengusaha "pribumi".

Sebenarnya permasalahannya lebih luas, yaitu bagaimana mengatasi akibat-akibat dari pengembangan strategi ekonomi yang cepat dan *private-oriented* bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mendapat kesempatan, dan bukan untuk mengu-

rangi kesempatan sektor swasta pada umumnya, apalagi berdasarkan alasan-alasan rasial yang bertentangan dengan ideologi atau konstitusi, yang pada akhirnya akan menghambat seluruh strategi tersebut. Strategi ini merupakan satu-satunya yang hingga kini terbukti berhasil di negara-negara ASEAN lainnya dan di kawasan Asia Pasifik dengan berkembangnya negara-negara industri baru. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut harus dituangkan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi (dengan UU antimonopoli dan sebagainya) dan bidang sosial (UU upah minimal yang pantas, tunjangan kesehatan dan hari tua pekerja dan sebagainya).

Dengan adanya ketegasan Pemerintah dan melalui perdebatan yang kadang-kadang sehat dan seringkali "ngawur", maka sudah lebih banyak kejelasan tentang masalah yang ada dan terdapat lebih banyak pengertian maupun kerja sama riil dan konkret antara pengusaha "pribumi" dan "non-pribumi" melalui *joint-ventures* dan *sharing* dalam berbagai bidang. Meskipun demikian tidak berarti bahwa masalah yang demikian kompleks dan sensitif sudah teratasi secara tuntas. Setidak-tidaknya, perdebatan dan pengertian yang dihasilkan melalui kerja sama konkret di antara kedua belah pihak telah mempercepat beberapa tahap penyelesaiannya.

Dari kedua masalah di atas jelas, bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia di masa mendatang ialah timbulnya berbagai macam kompleksitas modernisasi serta penyertaan ke dalam ekonomi internasional dan regional, yang sekaligus akan membawa tantangan baru dalam tubuh dan perkembangan masyarakat Indonesia. Sementara itu, pertentangan antara nilai-nilai baru yang modern dan internasional dengan nilai-nilai

rasial nasionalistis yang religius dan sempit, akan menimbulkan masalah dalam mencari kepastian dan pegangan guna menghadapi perkembangan baru yang demikian cepat, asing dan kadang-kadang menakutkan.

Masalah kepresidenan dan penggantinya yang menjadi bahan spekulasi pada tahun 1989, tampaknya akan menjadi jelas pada pertengahan tahun 1992 ini, karena anggapan umum bahwa Presiden Soeharto akan dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1993 untuk masa jabatan yang keenam, terutama setelah ABRI dianggap telah memberikan dukungan bulat pada Presiden Soeharto. Hal yang masih menjadi tanda tanya ialah siapa yang akan dicalonkan sebagai wakil presiden, mengingat bahwa masa ini kemungkinan masa jabatannya yang terakhir. Kemungkinan yang lain ialah siapa yang dipilih sebagai wakil presiden yang akan disiapkan atau dicoba oleh Presiden Soeharto untuk menjadi calon presiden berikutnya. Dalam kaitan ini, karena sebagai Pangab merupakan calon yang wajar dari ABRI, maka Jenderal Try Sutrisno dianggap paling memenuhi kriteria untuk jabatan tersebut.

Banyak pengamat luar negeri menanyakan apakah Presiden Soeharto tidak terlalu tua atau terlalu lelah setelah 25 tahun mengemban jabatan yang begitu berat. Ada pula yang menanyakan secara wajar bahwa dalam suatu era baru, dengan perubahan-perubahan sosial politik ekonomi dan lingkungan regional maupun internasional yang begitu mendasar apakah tidak diperlukan tokoh nasional baru yang lebih muda, yang lebih tanggap dan lebih luwes menghadapi perubahan-perubahan tersebut di masa yang akan datang. Masalahnya ialah Presiden Soeharto adalah seorang pemimpin dan pahlawan bangsa sebelum menjadi Presiden RI, sehingga selama beliau sanggup dan masih

mampu, sulit untuk tidak menerima dan mendukungnya menjabat sebagai Presiden. Apalagi jasa-jasa Presiden terhadap negara dianggap lebih besar daripada kekurangan-kekurangannya. Dalam masalah kebijaksanaan luar negeri, beliau juga merupakan negarawan yang sangat bijaksana dalam menjalankan kebijaksanaan dan yang dipercaya karena keseimbangan, kedewasaan dan kebijaksanaan yang telah ditunjukkannya, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Untuk itu, wakil presiden yang akan datang diharapkan benar-benar bisa disiapkan untuk kepresidenan berikutnya, maka harus dipilih calon yang tepat. Selain itu, diharapkan agar para Menteri Koordinator diberi wewenang untuk mengatur bidang masing-masing, karena sudah terlalu banyak dan kompleks kalau segalanya harus diatur Presiden Soeharto.

Satu soal yang cukup menarik perhatian dan agak mengkhawatirkan ialah cara-cara pencalonan anggota DPR dan MPR yang dilakukan Golkar. Masalahnya bukan pada proses yang sudah lebih mendengarkan usul-usul dari bawah dan lebih banyak menyangkut lembaga-lembaga Golkar di lapangan, tetapi yang menjadi masalah ialah bahwa pada tahap terakhir segala keputusan masih tergantung pada dewan pembina yang menilai calon-calon terbaik di antara yang diusulkan itu karena tidak setiap hari mereka mengikuti perkembangan Golkar secara terus-menerus. Dengan demikian jelas kedewasaan pengurus pusat akan terhambat, kalau terus-menerus dilakukan *micro-management* oleh dewan pembina, yang pada akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.

Melintasi segala perkembangan di atas ialah tumbuhnya LSM/NGO di berbagai bidang, dari lembaga konsumen sampai ke

masalah lingkungan dan lembaga bantuan hukum serta badan penegak hak-hak asasi manusia. Di dalamnya semenjak dulu terdapat lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti NU ataupun Muhammadiyah, dan lembaga pendidikan Kristen ataupun Katolik. Badan-badan pemikir, seperti CSIS, juga termasuk di dalamnya, sedangkan dalam tahun 1991 didirikan pula *Forum Demokrasi* yang diketuai Abdurrahman Wahid dan cendekiawan lain serta *Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat* dari Dharsono dan Petisi 50.

Kesemuanya itu menunjukkan betapa aktif masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian dari berbagai masalah masyarakat tanpa menunggu usaha Pemerintah. Pada umumnya LSM tersebut kecil dan sasaran yang akan diselesaikan juga terbatas. Tetapi ada pula yang keanggotaannya sampai puluhan juta (seperti NU) dan tujuannya bermacam-macam.

Semenjak pemerintahan Presiden Soeharto LSM-LSM ini tumbuh dengan pesat dan hampir tidak pernah bertentangan dengan Pemerintah, kecuali dua tahun yang lalu, di mana mereka menulis kepada IGGI agar dalam membantu Pemerintah RI disertai syarat-syarat yang memperhatikan masalah-masalah *rule of law* dan kemanusiaan.

Dengan berdirinya Forum pada tahun 1991 Pemerintah khawatir akan munculnya parpol, tetapi setelah penjelasan Forum dapat diterima Pemerintah, maka masalahnya selesai dan Forum dapat berfungsi untuk mendukung demokrasi dan persatuan bangsa. Pada umumnya, LSM-LSM justru tidak bersedia menggantungkan diri pada Pemerintah, dan meskipun kadang-kadang ada yang mendukung kebijaksanaan Pemerintah, tetapi ada pula yang menentang

seperti di dalam masalah lingkungan dan hutan tropis.

Justru karena prinsip berdiri sendiri itu, LSM-LSM telah berjasa pada masyarakat dengan mengambil sikap dan kebijaksanaan yang korektif dalam berbagai masalah. Karena itu LSM bukan seperti parpol atau Golkar karena sasaran-sasarannya tidak mencari kebijaksanaan-kebijaksanaan negara secara umum, tetapi sasaran yang sifatnya khusus dan melaksanakannya secara mandiri di mana mungkin.

Munculnya berbagai LSM itu merupakan suatu "penyegaran" dalam rangka mengatasi keterbatasan parpol dan Golkar untuk membantu pembangunan masyarakat, meskipun sasaran-sasarannya terbatas. Kehadiran mereka memang diperlukan untuk mengatasi kebekuan ormas-ormas yang sudah menjadi suatu organisasi formal tanpa aktivitas-aktivitas yang konkret bagi masyarakat dan rakyat. Dengan demikian LSM secara riil telah melengkapi kehidupan demokrasi di RI, terutama dalam memperjuangkan *rule of law* serta hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan perkembangan-perkembangan tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang masa depan Indonesia. Pertama, Pemilu tahun 1992 nanti tidak akan mudah bagi Golkar. Dalam Pemilu tahun 1987 Golkar telah memenangkan suatu persentase yang cukup tinggi yaitu 73% bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya (1971, 1977, 1982), yaitu 62-64%. Kemenangan tersebut antara lain karena perpecahan pimpinan PPP dan NU yang membebaskan anggotanya untuk memilih Golkar atau dua Parpol lainnya, PPP dan PDI.

Selain itu, Golkar sudah berkuasa semenjak 1971 dan sejak Pemilu tahun 1987

mengalami pengaruh adanya kejenuhan, terutama dari generasi muda. Padahal pada tahun 1992, lebih dari 17 juta generasi muda untuk pertama kalinya akan memilih dibandingkan dengan sekitar 12 juta pada tahun 1987 dan tidak ada yang tahu yang mana yang akan mereka pilih pada Pemilu 1992.

Disamping itu, kondisi PPP (dan PDI) pada saat ini lebih terkonsolidasi dibandingkan waktu Pemilu tahun 1987. Sedangkan perkembangan ekonomi tahun 1992, seperti tahun 1991, meskipun bukan suatu "boom" tetapi cukup memadai, sehingga tidak akan terlalu membantu Golkar, juga tidak terlalu memberatkan, yaitu lebih bersifat netral. Tetapi gejala bahwa Golkar akan lebih mendapat dukungan di pedesaan dan di kota-kota kecil daripada di kota-kota besar tetap masih berlaku. Kemungkinan hasilnya yang kurang dari 60% untuk Golkar, seperti pada tiga pemilu sebelum tahun 1987, akan merupakan hasil yang cukup menggembirakan dan lebih normal untuk mereka. Untuk mencapai hasil itu pun merupakan suatu perjuangan yang berat bagi Golkar.

Bagi PPP dengan dikonsolidasikan DPP-nya dan dengan kemungkinan sebagian besar dari anggota NU dapat kembali memilih PPP, maka kemungkinan dapat terjadi penambahan persentase dan jumlah kursi. Sedangkan tantangan PDI ialah apakah masih dapat menguasai suara rakyat kecil dan generasi muda di kota-kota besar, seperti yang pernah dilakukannya pada Pemilu tahun 1987 yang lalu.

Kedua, seperti telah disinggung di atas, sudah pasti Presiden Soeharto akan terpilih kembali pada tahun 1993 nanti setelah ABRI memberikan dukungan bulatnya terhadap beliau. Begitu pula Golkar diharapkan akan menyatakan dukungannya pada HUT

Golkar tanggal 20 Oktober nanti. Yang perlu dipertanyakan ialah siapa yang didukung Presiden Soeharto sebagai calon wakil presidennya. Mengingat ABRI akan mencalonkan Pangab Jenderal Try Sutrisno, selaku pimpinan tertingginya, maka dapat diharapkan Presiden Soeharto yang mengenal dan percaya pada Jenderal Try Sutrisno dapat mendukungnya. Dukungan tersebut penting agar dia sekaligus dapat dipersiapkan sebagai calon utama bagi Presiden RI yang akan datang, meskipun pada akhirnya tentu MPR yang akan menentukan.

Kesemuanya di atas merupakan perkiraan secara logis dari apa yang dapat terjadi, berdasarkan pengalaman dan perkiraan yang memang ada dalam perkembangan politik di Indonesia selama ini.

Masalah-masalah yang akan dihadapi Indonesia di masa yang lebih panjang ialah: bagaimana menampung desakan-desakan dari kelas menengah baru yang menuntut partisipasi lebih banyak dalam proses demokrasi di Indonesia, namun sekaligus menjaga kestabilan dan konsistensi yang juga diperlukan bagi pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi kelas menengah tersebut timbul khususnya karena keberhasilan pembangunan yang melibatkan generasi muda di berbagai bidang kegiatan sebagai tenaga profesional, birokrat, wiraswasta dan militer. Mereka pada umumnya lebih terdidik, mempunyai hubungan dengan luar negeri melalui pendidikan, media massa atau pengalaman. Sebaliknya, mereka tidak mempunyai pengalaman atau ingatan tentang zaman Orde Lama yang penuh pertentangan dan konflik politik ataupun keterbelakangan ekonomi, lebih-lebih tentang kolonialisme dan perang kemerdekaan.

Karena keterbukaan masyarakat, mereka

mendapat pula pengaruh dari luar negeri, baik dengan nilai-nilai internasional ataupun karena globalisasi ekonomi yang telah mengubah ekonomi Indonesia secara mendalam dan tanpa bisa dibalik lagi ke ekonomi tertutup. Nilai-nilai internasional telah membawa keinginan akan *rule of law*, hak-hak asasi manusia, proses demokrasi yang lebih cepat, apalagi dengan adanya perubahan-perubahan Eropa Timur dan US. Tekanan-tekanan luar ini dan perubahan-perubahan dari dalam telah mengubah masyarakat Indonesia. Selain itu, fase transisi sekarang ini penuh pula dengan bahaya karena sebagian besar masyarakat belum berpikiran maju dan masih bersifat agraris, dan perubahan yang terlalu cepat akan membangkitkan kembali sifat-sifat primordial bangsa yang masih cukup kuat, seperti fundamentalisme, agama, rasialisme, dan kesukuan. Karena itu, keseimbangan antara perubahan dan stabilitas harus dijaga. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana menempunya, supaya cukup ada perubahan tetapi sistem tidak akan meledak, sehingga perubahan itu tidak akan membawa anarki.

Di sinilah letak tantangan baru bagi Presiden Soeharto dan pimpinan ABRI serta Golkar, yang masih merupakan kekuatan politik yang menentukan jalannya perubahan dan modernisasi masyarakat Indonesia untuk masa depan. Secara konkret hal itu dapat diartikan: pertama, sebagai pengembangan keterbukaan sistem politik dengan stabilitas, yang berarti diperlukannya konsensus nasional baru untuk masa depan antara generasi muda ABRI dan generasi muda sipil tentang sistem tersebut, termasuk mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dwifungsi ABRI untuk masa depan.

Kedua, mengembangkan sistem ekonomi yang *free market-oriented* dan *export-led*

growth, tetapi sekaligus menjaga dampaknya terhadap keadilan sosial dengan koreksi-koreksi di bidang kebijaksanaan ekonomi itu sendiri (UU antimonopoli, ketertiban bursa, keterkaitan ekonomi perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil, dan lain-lain), serta kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial (seperti UU pensiun dan kesehatan pekerja, upah minimum, dan sebagainya).

Ketiga, perlu mengasimilasikan nilai-nilai baru internasional ke dalam nilai hakiki dan jati diri melalui pendidikan dan penerangan, sehingga menjadi milik baru bangsa Indonesia tanpa gejolak-gejolak yang besar.

Untuk kesemuanya itu keteladanan kepemimpinan nasional, keterbukaan pimpinan masyarakat, sikap *self-restraint* kelompok-kelompok masyarakat dan akhirnya solidaritas nasional merupakan hal-hal yang mutlak harus ditempa, karena tidak ada contoh negara dan bangsa lain yang memadai untuk diikuti. Bagi Indonesia yang baru pertama kali mengalami perubahan-perubahan fundamental secepat ini, perkembangan yang *zig-zag* tidak selalu dapat dielakkan. Untuk itu, belajar dari kesalahan adalah prinsip yang harus diterima sejak semula. Dengan demikian keterbukaan akan perubahan dan fleksibilitas perlu mutlak diakui oleh kepemimpinan nasional.

Peranan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik di Masa Mendatang

Peranan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara

Peranan tersebut pertama-tama meliputi peranan dalam ASEAN. ASEAN telah dapat menerima Indonesia sebagai anggota

yang baik setelah mengalami fase pra-ASEAN yang penuh ketegangan. Karena jumlah penduduk dan wilayahnya yang besar secara *de facto* Indonesia dianggap sebagai pemimpin ASEAN, dan secara politis diterima karena Indonesia tidak pernah memaksakan kepemimpinannya itu. Oleh karena itu ASEAN hingga kini merupakan organisasi yang sukses karena kepercayaan dan rasa senasib secara riil dirasakan bersamasama di antara anggotanya. Bagi Indonesia faktor lingkungan adalah penting, karena penduduk dan wilayah Indonesia yang lebih dari separuh populasi dan wilayah ASEAN dan pengalaman keterbelakangannya dalam bidang ekonomi yang telah membuatnya *vulnerable* sampai tahap tertentu dalam hubungan luar negeri pada masa pra-ASEAN. Memang sekarang Indonesia dapat dengan tegas menyatakan bahwa secara unilateral, ideologis dan atau diplomatis hal tersebut dapat dilakukannya. Tetapi secara emosional karena sejarah dan secara ekonomis, RI tidak merasa mutlak perlu melakukannya hingga kini. Karena itu, bagi RI ASEAN merupakan soko guru dari kebijaksanaan luar negerinya.

Akhirnya di dalam perubahan-perubahan fundamental yang terjadi secara global dan regional, sewajarnya negara-negara kecil atau menengah bekerja sama untuk dapat menghadapinya dengan lebih mantap. Karena itu ASEAN akan tetap relevan untuk RI di masa-masa yang akan datang.

ASEAN sendiri sedang menghadapi tantangan bagaimana menjawab perubahan-perubahan tersebut agar ASEAN tetap relevan di Kawasan dan di dunia. KTT-ASEAN IV bulan Januari 1992 yang lalu di Singapura merupakan pertanda apakah memang ASEAN mampu menjawab tantangan-tantangan baru tersebut. Untuk itu, peranan

serta "kepemimpinan" Indonesia sangat diharapkan.

Beberapa tantangan yang sedang dihadapi ASEAN antara lain meliputi: pembenahan organisasi ASEAN, termasuk Sekretariat Jenderal, yang sangat penting bila ASEAN hendak menjawab tantangan-tantangan baru. Sekelompok *wise-men* telah mengajukan usul-usulnya, dan kelihatannya perbaikan Sekretariat Jenderal yang diusulkannya meliputi peningkatan status, penambahan wewenang, personil dan keuangan akan diterima oleh anggota-anggota ASEAN. Soal peran dan wewenang KTT dalam ASEAN, adanya Menteri yang khusus ditugaskan untuk ASEAN (yang sekarang *ex officio* dijabat Menlu) dan adanya wakil-wakil anggota ASEAN pada Sekretariat Jenderal yang akan menggantikan *Standing Committee*, masih terlalu pagi untuk dapat diterima seluruhnya.

Selain itu, kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, meskipun banyak dibicarakan, belum pernah benar-benar menjadi kenyataan. Padahal bila ASEAN berniat menggalakkan hubungan ekonomi dengan mitra-mitranya di kawasan Asia Pasifik dan Eropa, maka landasan kerja sama antar-ASEAN maupun daya tarik ekonomi dan pasar ASEAN bersama harus meyakinkan. Hal ini hanya bisa dicapai bila ASEAN dapat membentuk satu pasar yang secara potensial sangat berarti di masa depan melalui suatu *Free Trade Area* pada tahun 2000 atau 2007 (ulang tahun ASEAN ke-40). Diperkirakan pada tahun 2007 GNP ASEAN bersama akan meliputi US\$1,2 trilyun, bila dapat berkembang rata-rata 7% seperti beberapa tahun yang lalu. Untuk dekade ini Indonesia (dan Filipina), masih agak meragukan konsep FTA ini karena kondisi ekonominya yang masih terbelakang dibandingkan Singapura, Malaysia

dan Thailand yang mendukung ide tersebut.

Pada tahun 1990 Indonesia telah mengajukan ide CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yang merupakan perbaikan dari kebijaksanaan FTA dengan penghapusan tarif secara berkelompok tetapi tidak sampai pada ide menghapuskan tarif pada tahun tertentu dalam jangka waktu menengah agar bisa dipercayai. Indonesia pada umumnya dapat menerima ide FTA dengan tahun berlakunya yang mungkin lebih panjang dari tahun 2000, meskipun mengakui bahwa kepastian tahunnya perlu diberikan, agar dipercayai. Sementara ini Indonesia juga masih mempelajari cara-cara dan bidang-bidang yang akan diliputi FTA tersebut.

Indonesia akan lebih positif menerima ide FTA, karena ekonomi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lebih kompetitif dan lebih kompatibel dibanding dengan ekonomi-ekonomi ASEAN lainnya. Meskipun demikian, berbagai studi dan perdebatan masih diperlukan di antara para pemimpin dan pemikir Indonesia sebelum RI sama sekali *committed* pada ide FTA ini. Akhirnya ide CEPT akan diterima sebagai langkah pertama ke arah FTA yang mungkin sekali diterima untuk tahun 2000, tetapi dengan beberapa pengecualian bagi RI dan Filipina. Ide ini akan diletakkan dalam suatu *Economic Treaty* seperti yang diusulkan Filipina.

Tantangan yang lain adalah kerja sama antara ASEAN dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang penting pula untuk dipikirkan, dibicarakan dan ditempa dalam jangka pendek, terutama karena alasan terakhir yang memisahkan ketiga negara Indocina dan ASEAN, yaitu konflik di Kamboja yang akan mencapai penyelesaian dalam

waktu dekat ini. Masalah Birma masih akan memakan waktu, tetapi itu pun hanya menunggu waktu saja. Beberapa tahun yang lalu, banyak dikemukakan pendapat agar ASEAN bersedia menerima negara-negara Indocina sebagai anggotanya segera setelah konflik di Kamboja dapat diselesaikan. Setelah penyelesaian itu hampir menjadi kenyataan, maka kini kemungkinan itu kembali dipersoalkan, seperti halnya perdebatan dalam EC untuk menghadapi negara-negara Eropa lainnya, termasuk negara-negara Eropa Tengah, yang menyangkut pendalaman dulu atau perluasan keanggotaannya setelah 1992 nanti.

Kebanyakan anggota ASEAN sedang menghadapi begitu banyak tantangan dalam waktu dekat ini, sehingga sulit mempertimbangkan penerimaan anggota baru, apalagi bila calon anggota itu memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Hal ini berlaku terutama bagi negara-negara Indocina yang berlainan sistem politik dan ekonominya; meskipun mereka sudah mulai berubah, tetapi belum cukup jelas mengenai kecepatan dan volume perubahannya.

Oleh sebab itu, timbul beberapa pemikiran antara lain dengan cara mengajak mereka menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* yang memuat prinsip-prinsip orde regional ZOPFAN, dan lalu mengajak mereka melakukan kerja sama fungsional, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu dapat dilakukan pertemuan-pertemuan tahunan para menteri. Inti Orde Regional di atas ialah penyelesaian konflik-konflik secara damai dan kerja sama di pelbagai bidang, terutama bidang ekonomi.

Bila sudah ada kesesuaian sistem maupun tahap ekonomi, barulah dibuka kemungkinan akan penambahan keanggotaan

ASEAN. Sementara itu, tingkat kerja sama ASEAN diharapkan lebih mantap dan maju pula sehingga dapat menerima keanggotaan baru. Dalam hubungan dengan negara-negara Indocina, terutama dengan Vietnam, hubungan RI-Vietnam yang dianggap terbaik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Maka ASEAN akan banyak tergantung pada sikap RI dalam menentukan sampai di mana dan berapa cepat hubungan negara-negara Indocina dengan ASEAN.

Di dalam rangka mencapai orde regional ZOPFAN, berdasarkan *Treaty of Amity and Friendship 1976*, hubungan antar negara-negara ASEAN dan hubungan antara ASEAN dengan negara-negara Indocina/Birma dapat diatur. Akan tetapi, hubungan dengan negara-negara besar di kawasan tidak dapat dicakup, karena hubungan tersebut meliputi seluruh kawasan Asia Pasifik. Karena seluruh kawasan tersebut secara ekonomis dan strategis telah menjadi satu, sehingga kawasan Asia Tenggara tidak dapat lagi dipisahkan dari kawasan Asia Timur.

Karena itu pula, maka ide orde regional itu harus meliputi pula seluruh kawasan Asia Pasifik, di mana hubungan ASEAN dengan keempat negara besar AS, US, RRC dan Jepang dapat diatur secara seimbang. Alasan bahwa kawasan Asia Pasifik telah menjadi satu paling jelas terletak di bidang penyatuan ekonomi, terutama di bidang manufaktur yang disebabkan perubahan struktur dan karena adanya kebijaksanaan ekonomi Jepang setelah perjanjian Plaza di bidang moneter pada tahun 1985.

Disamping itu, hubungan-hubungan politik secara bilateral telah normal dan diintensifkan seperti antara RI-RRC, RRC-US, US-Korea Selatan, RRC-Korea Selatan,

RRC-Taiwan, RRC-Vietnam dan US-Jepang. Dan karena desakan perkembangan ekonomi di kawasan yang dianggap demikian pentingnya, terutama agar dapat diteruskan dan malahan ditingkatkan, maka konflik-konflik regional pun telah diselesaikan atau dalam taraf penyelesaian dan tidak akan menjadi konflik terbuka, antara lain Kamboja, Northern Territories, Spratly's dan Paracel, Taiwan-RRC ataupun Semenanjung Korea.

Demi kelangsungan perkembangan ekonomi tersebut maka perlu diselenggarakan dialog di bidang politik-keamanan, yang hingga kini belum ada secara multilateral untuk kawasan Asia Pasifik, seperti di Eropa dengan CSCE. Di antara lembaga-lembaga yang ada, jelas ASEAN-PMC lah satu-satunya yang dianggap siap untuk memulai dialog politik keamanan, karena sudah meliputi 12 anggota di kawasan dan telah memulai dialog bilateral dengan US dan RRC. Selain itu, lembaga tersebut sudah membahas masalah keamanan seperti konflik Kamboja dan masalah pengungsi Indocina semenjak yang pertama pada tahun 1979.

Dengan demikian secara bertahap dapat dimulai pembentukan suatu orde regional untuk seluruh kawasan Asia Pasifik, yang dapat dimulai dengan CBM, dialog tentang masalah-masalah bersama, antara lain mencari penyelesaian konflik-konflik regional dan pada akhirnya *arms control* sampai *disarmament* untuk kawasan.

Tentu saja kawasan ini berbeda, oleh karena itu seluruh agenda CSCE tidak dapat dilaksanakan di kawasan ini. Tetapi banyak yang dapat dibandingkan dan dipelajari dari suatu proses yang meskipun tidak lengkap, seperti upaya penyelesaian masalah Yugoslavia, tetapi dapat disempurnakan sebagai-

mana halnya menghadapi perubahan-perubahan di Uni Soviet.

Pada akhirnya, kawasan Asia Pasifik akan mempunyai dua badan kerja sama regional, yaitu APEC untuk bidang ekonomi dan ASEAN-PMC untuk bidang politik dan keamanan. Dalam kerangka ini bagaimana-pun KTT ASEAN IV di Singapura harus menyatakan kemauan politik ASEAN, dan ASEAN-PMC sendiri harus diubah agar dapat melakukan dialog tersebut secara mantap.

Jepang telah mendukung ide itu dalam rangka mencari peranan politiknya di kawasan, sedangkan RRC secara *tentative* mulai memberikan dukungannya. Negara terpenting yang masih perlu diyakinkan ialah AS, yang masih belum sempat memusatkan perhatiannya pada kawasan Asia Pasifik secara menyeluruh, karena masalah-masalah urgen adalah di Eropa, US dan Timur Tengah. Selain itu urgensi mengadakan *arms control* dalam bidang maritim tidak mendasak akibat supremasinya di bidang itu, apalagi karena vital bagi strategi pertahanannya sebagai kekuatan maritim. Namun dengan ambruknya US sebagai kekuatan adikuasa, alasan ini sudah tidak berlaku lagi. Karena itu, usaha bersama untuk membentuk badan dialog tidak akan ditentang AS, asalkan dimulai dengan agenda yang terbatas dan riil, yaitu dialog tentang masalah-masalah politik-keamanan di kawasan, sampai AS siap untuk berpartisipasi politik penuh.

Masalah yang erat hubungannya dengan ide ini ialah kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik pada masa depan dan kerja sama pertahanan ASEAN yang akan datang, selama orde regional seperti yang diidam-idamkan di atas belum tercapai. Dengan adanya orde regional tersebut diharapkan

akan terdapat keseimbangan antara keempat negara besar di kawasan. Karena itu kehadiran militer di kawasan masih diperlukan untuk menjaga kestabilan, perkembangan dan perdamaian.

Untuk itu berbagi beban adalah penting bagi AS. Dan keterbatasan anggaran serta tiadanya ancaman dari US akan mengurangi kehadiran militer tersebut di kawasan. Berbagi beban bagi ASEAN berarti bahwa fasilitas-fasilitas seperti di Singapura dan Thailand dapat dipergunakan oleh Armada VII AS, sedangkan pangkalan Subic masih penting bila dapat dipertahankan oleh tubuh politik Filipina. Kerja sama militer AS-Jepang adalah yang terpenting bagi AS di mana pangkalan Yokosuka dan Okinawa menjadi vital, sehingga dukungan ASEAN untuk aliansi tersebut penting pula dalam berbagi beban. Pada akhirnya ASEAN harus meningkatkan kerja sama militernya, baik secara bilateral maupun secara multilateral bila muncul ancaman konvensional di masa yang akan datang.

Di dalam usaha-usaha di atas, sebagaimana dukungan RI terhadap dukungan ASEAN untuk APEC, maka diperlukan ketegasan, kepemimpinan dan dukungan yang jelas dari RI agar ide-ide tersebut dapat menjadi ide-ide ASEAN. Di samping karena besarnya, juga karena ideologinya yang non-blok, RI perlu mendukung ide-ide baru ASEAN dalam menghadapi perkembangan di bidang ekonomi dan strategi di kawasan. Sebab biasanya RI enggan terikat dalam ikatan-ikatan di bidang keamanan, sedangkan dalam bidang ekonomi pada waktu yang lalu RI biasanya merasa ketinggalan.

Di bidang kerja sama ekonomi regional, sejak permulaan RI sudah aktif dalam ide kerja sama ekonomi Asia Pasifik, dan men-

jadi salah satu pendukung penting dari PECC semenjak awal (1980). Lalu pada pertemuan pertama APEC telah mendorong ASEAN untuk mendukung ide tersebut (Canberra 1989). Karena itu, RI berpendapat agar EAEG jangan sampai memecah, apalagi berkonfrontasi dengan APEC dan mengusulkan untuk pada awalnya menjadi *caucus* dalam APEC. Kini APEC telah beranggotakan 15 negara dan pada tahun 1992 diharapkan akan berkonsolidasi dalam suatu pelebagaan awal, antara lain dengan adanya sekretariat.

Selain dianggap sebagai model kerja sama negara maju dengan negara berkembang secara regional, ide APEC/PECC juga dimaksudkan untuk dapat mempertahankan AS di kawasan Asia Pasifik, mengatasi pertentangan AS-Jepang, dan menghadapi terbentuknya blok perdagangan di kawasan ataupun di Eropa. Ide ini tentunya akan menempa suatu struktur kerja sama regional, di mana Cina dan US dapat berpartisipasi secara positif.

Penutup

Di atas telah diuraikan mengenai perkembangan domestik RI dalam beberapa tahun yang lalu dan kemungkinan perkembangan di tahun-tahun mendatang. Diuraikan pula analisis tentang dasar masalah-masalah Indonesia yang akan dihadapi Indonesia di masa yang akan datang.

Dari uraian tersebut jelas bahwa masalah-masalah itu makin kompleks, perubahan-perubahan makin cepat dan kapasitas pemerintah dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang mengaturnya makin terbatas. Karena itu, desakan akan keterbukaan dan partisipasi masyarakat tidak dapat dielakkan.

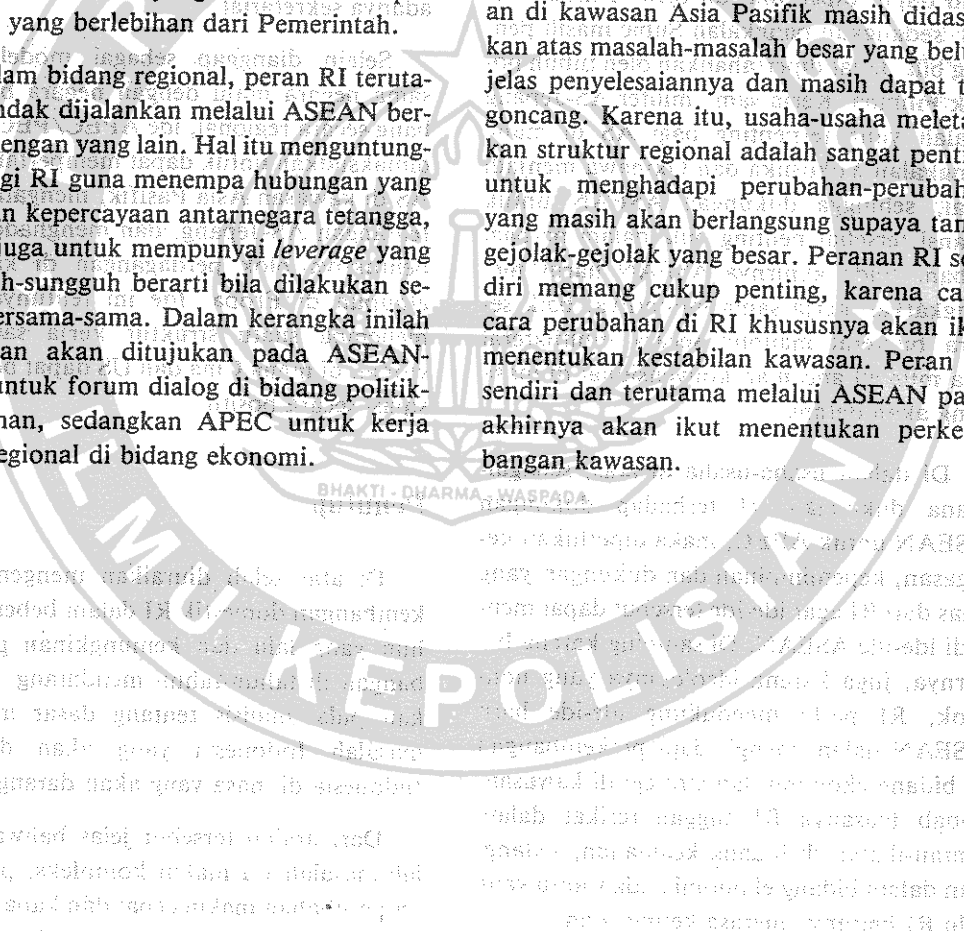
Semakin hal ini disadari dan makin didukung agar dapat terlaksana secara evolusioner dengan gejala-gejala yang minimal, akan makin baik untuk menghadapi dan mengimbangi perubahan tersebut.

Begitu pula perkembangan ekonomi telah mendapatkan momentumnya sendiri, dan meskipun akan mengalami pasang surut, tetapi akan terus mengubah dan mengembangkan ekonomi itu sendiri. Pada pokoknya, tiada jalan untuk kembali pada struktur ekonomi yang lalu dan campuran tangan yang berlebihan dari Pemerintah.

Dalam bidang regional, peran RI terutama hendak dijalankan melalui ASEAN bersama dengan yang lain. Hal itu menguntungkan bagi RI guna menempa hubungan yang erat dan kepercayaan antarnegara tetangga, tetapi juga untuk mempunyai leverage yang sungguh-sungguh berarti bila dilakukan secara bersama-sama. Dalam kerangka inilah perhatian akan ditujukan pada ASEAN-PMC untuk forum dialog di bidang politik-keamanan, sedangkan APEC untuk kerja sama regional di bidang ekonomi.

Karena kawasan Asia Pasifik mempunyai kestabilan, perdamaian dan perkembangan yang pesat, maka usaha-usaha untuk kerja sama regional menjadi penting agar dinamika yang ada dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kestabilan dan perdamaian dapat dipelihara.

Berbeda dengan kawasan Eropa, di mana gejala yang bertubi-tubi akan tetap ada di masa depan meskipun tidak akan menimbulkan perang besar, maka keseimbangan di kawasan Asia Pasifik masih didasarkan atas masalah-masalah besar yang belum jelas penyelesaiannya dan masih dapat tergoncang. Karena itu, usaha-usaha meletakkan struktur regional adalah sangat penting untuk menghadapi perubahan-perubahan yang masih akan berlangsung supaya tanpa gejala-gejala yang besar. Peranan RI sendiri memang cukup penting, karena cara-cara perubahan di RI khususnya akan ikut menentukan kestabilan kawasan. Peran RI sendiri dan terutama melalui ASEAN pada akhirnya akan ikut menentukan perkembangan kawasan.



...dalam bidang regional, peran RI terutama hendak dijalankan melalui ASEAN bersama dengan yang lain. Hal itu menguntungkan bagi RI guna menempa hubungan yang erat dan kepercayaan antarnegara tetangga, tetapi juga untuk mempunyai leverage yang sungguh-sungguh berarti bila dilakukan secara bersama-sama. Dalam kerangka inilah perhatian akan ditujukan pada ASEAN-PMC untuk forum dialog di bidang politik-keamanan, sedangkan APEC untuk kerja sama regional di bidang ekonomi.

...Kawasan Asia Pasifik mempunyai kestabilan, perdamaian dan perkembangan yang pesat, maka usaha-usaha untuk kerja sama regional menjadi penting agar dinamika yang ada dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kestabilan dan perdamaian dapat dipelihara.